

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI DAN PENETAPAN HARGA LPG TABUNG GAS 3 KG BERSUBSIDI DI KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (Studi Kasus Pada Desa Sungai Buluh Dan Desa Mantaas)

Maulidawati<sup>1</sup>, Arpandi<sup>2</sup>, Saidah Hasbiyah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: [mmaulida135@gmail.com](mailto:mmaulida135@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah permasalahan yang terjadi di Desa Sungai Buluh dan Mantaas. Pertama, penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi masih belum sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Kedua, terdapat perbedaan harga jual LPG 3 kg bersubsidi di beberapa pangkalan gas. Ketiga, minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan LPG 3 kg bersubsidi menyebabkan adanya pangkalan yang menjual serta mendistribusikan LPG 3 kg kepada pihak pengecer. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan distribusi dan penetapan harga LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara snowball sampling yang melibatkan 15 orang. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diuji kredibilitasnya melalui perpanjangan waktu observasi, peningkatan ketekunan, triangulasi data, analisis data negatif, referensi tambahan, serta member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi dan penetapan harga LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masih belum optimal. Dari 13 indikator terdapat 5 indikator yang kurang baik. Pertama, indikator koordinasi dengan instansi lain kurang baik karena koordinasi tidak berjalan dengan baik antar pihak pengawas. Kedua, indikator opini publik kurang baik karena adanya pangkalan yang memberikan jatah kepada pengecer. Ketiga, indikator kondisi sosial kurang baik karena masyarakat masih melihat dari segi harga. Keempat, indikator kondisi ekonomi kurang baik karena harga yang tidak sesuai dengan harga mestinya. Kelima sikap atas kebijakan kurang baik karena proses implementasi bisa disebabkan oleh sikap dari kelompok terdapat keputusan. Disamping itu faktor pendukung dalam Distribusi Penentuan harga LPG tabung gas 3 kg bersubsidi di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dipengaruhi oleh 8 faktor pendukung dan 5 faktor penghambat. Untuk memperbaiki distribusi dan penetapan harga LPG tabung gas 3 kg bersubsidi di wilayah tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih aktif dalam menyosialisasikan informasi kepada agen, pangkalan, maupun masyarakat terkait dan Pembuatan Tim Pengawasan perlu dibentuk kelompok pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat desa/kelurahan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, LPG Tabung Gas 3 Kg

### ABSTRACT

*This study focuses on issues identified in the villages of Sungai Buluh and Mantaas. The main problems are: first, the allocation of 3 kg LPG gas is still not reaching the intended targets; second, discrepancies in the selling price of subsidized 3 kg LPG are evident at some distribution points; and third, insufficient government socialization about the policies for subsidized 3 kg LPG has led to bases selling and distributing this gas to unauthorized buyers. The research aims to examine the implementation of the distribution policy and pricing of subsidized 3 kg LPG cylinders in North Labuan Amas District, Hulu Sungai Tengah Regency, as well as to identify the factors influencing this implementation. A qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Using a*

*snowball sampling technique, 15 respondents were selected. The collected data were analyzed, and the credibility was ensured through techniques such as extending observation periods, enhancing diligence, triangulating negative data analysis, utilizing reference materials, and providing supporting evidence. The findings indicate that the execution of the distribution policy and pricing for subsidized 3 kg LPG cylinders in North Labuan Amas District is suboptimal. Of the 13 indicators assessed, five were found to be unsatisfactory. First, the indicators of coordination with other agencies are not good because coordination does not go well between supervisory parties. Second, the indicators of public opinion are not good because of the pagkalan that gives allotments to diluents. Third, the indicator of social conditions is good because people are still looking at prices. Fourth, indicators of poor economic conditions because prices are not in accordance with the price they should be. Fifth, the attitude towards policies is not good because the implementation process can be caused by the attitude of the decision-making group. In addition, the supporting factors in the Distribution and Pricing of Subsidized 3 Kg Gas Cylinder Lpg in North Labuan Amas District, Hulu Sungai Tengah Regency are 8 supporting factors and 5 inhibiting factors. To increase the distribution and pricing of subsidized 3 kg gas cylinders in North Labuan Amas District, Hulu Sungai Tengah Regency, it is recommended to To the Regional Government and the Trade Office of Hulu Sungai Regency Middle to be more aggressive in socializing agents and bases or the community concerned and the creation of a monitoring team needs to form a monitoring group involving local governments, related agencies, and village/sub-district officials.*

**Keyword:** Implementation, Policy, LPG Gas Cylinders 3 Kg

## PENDAHULUAN

Melimpahnya sumber daya alam dan mineral di Indonesia bisa dikategorikan ada beberapa sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya yang jumlahnya terbatas dan penggunaannya lebih banyak dari pada prosesnya karena digunakan secara terus-menerus. Minyak bumi ditemukan di lapisan teratas pada beberapa wilayah di kerak bumi. Zat ini merupakan campuran kompleks berbagai hidrokarbon, yang sebagian besar termasuk dalam kelompok alkana, meskipun sifat, komposisi, dan tingkat kemurniannya dapat bervariasi

Gas elpiji ukuran 3 kg merupakan salah satu produk energi yang dihasilkan oleh PT Pertamina dengan dukungan subsidi dari pemerintah. Program ini dirancang untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan minyak tanah ke LPG sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pergantian ini tidak hanya membantu mengurangi biaya rumah tangga tetapi juga mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani anggaran negara. Selain itu, penggunaan LPG memiliki keunggulan karena menghasilkan polusi yang lebih rendah dibandingkan minyak tanah.

Gas elpiji diharapkan bisa membantu masyarakat golongan bawah menghemat pengeluaran dengan penggunaan gas dan mampu mengganti kelangkaan minyak tanah. Sebagai terobosan baru dalam memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia, diharapkan masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis bahan bakar. Dalam melaksanakan kebijakan penggunaan LPG, pemerintah perlu merancang langkah-langkah agar distribusi LPG berjalan secara adil dan tepat sasaran. Distribusi LPG 3 kg dilakukan melalui penyalur dan sub-penyyalur, yang sering disebut juga sebagai pangkalan LPG 3 kg. Penyalur atau agen LPG 3 kg terdiri dari koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta nasional yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan proses distribusi. Sementara itu, sub-penyyalur atau pangkalan LPG 3 kg adalah badan usaha atau individu yang memiliki izin resmi dari PT. Pertamina dan Dinas terkait di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kebijakan publik berupa bantuan bersubsidi yang diperuntukan untuk masyarakat golongan tak mampu sudah banyak diberikan kepada masyarakat dengan bertujuan agar bantuan subsidi dari pemerintah bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. "Sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri serta mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak demi meringankan keuangan negara, diperlukan pengalihan penggunaan minyak tanah ke gas LPG. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2007, peraturan terkait penyediaan, distribusi, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg dalam Peraturan Presiden ini mencakup pengaturan volume penjualan tahunan, penetapan harga acuan, harga jual eceran, serta ketentuan ekspor dan impor tabung LPG 3 kg.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Amuntai Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan tersebut dan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian Daud Markus (2017) di Universitas Riau yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas 3 Kg di Kabupaten Minasa Selatan", hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg di daerah tersebut sudah berjalan dengan baik. Namun, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam hal koordinasi antara PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah terkait pembagian wilayah distribusi. Selain itu, perlu ada penetapan kelompok sasaran yang lebih jelas melalui kebijakan resmi, dengan membatasi pembelian LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga (RT) atau masyarakat yang termasuk kategori miskin dan rentan miskin, dengan kuota maksimal 3 tabung per bulan. Untuk usaha mikro, disarankan pembelian dibatasi hingga 2 tabung per transaksi, yang dapat diperoleh melalui kartu keluarga sejahtera.

## METODE

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang fokus pada penjabaran kejadian-kejadian yang berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian (Pasolong, 2016). Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi (Sugiyono, 2023). Dengan menggunakan *Snowball sampling*, peneliti memilih 15 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Metode yang digunakan untuk menentukan sumber data dengan tujuan tertentu dikenal dengan istilah *Snowball sampling* (Sugiyono, 2023). Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dalam "Teori Donald S. Van Meter Carl E Van Horn (Dalam Sahya Anggara 2014: 240-244)", yakni standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, konsi sosial ekonomi dan politik dan krakterisrik agen peleksana. Kondensasi data, menampilkan data, serta membuat kesimpulan, dan memverifikasinya adalah beberapa cara yang diterapkan untuk menilai informasi yang terkumpul (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Uji Kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan bahan referensi, melakukan *member check*, menganalisis kejadian negatif, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan memperpanjang atau memperluas pengamatan (Sugiyono, 2023).

## PEMBAHASAN

### A. “Implementasi Kebijakan Distribusi Dan Penetapan Harga Lpg Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pada Desa Sungai Buluh Dan Desa Mantaas)”

Tindakan implementasi, menurut Van Meter dan Horn Meter (Wahab, 2006:66), adalah upaya yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan hasil yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang telah disepakati.

#### 1. Tujuan dan Standar Kebijakan

Kebijakan dan standar yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci mengenai tujuan yang ingin diwujudkan serta kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan tersebut.

##### a. Kejelasan

Kejelasan ialah bagaimana informasi kebijakan dapat disampaikan dengan jelas kepada orang yang melaksanakan kebijakan harus memiliki pemahaman yang tegas dan tidak menimbulkan keraguan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari desa Sungai Buluh dan Desa Mantaas bisa di simpulkan bahwa cukup baik karena kejelasan kebijakan tersebut sudah nyata oleh masyarakat karena kejelasan kebijakan ini jelas dan di mengerti oleh masyarakat saat mengimplementasikannya. Sebaliknya jika kebijakan ini tidak jelas maka sulit untuk di mengerti oleh masyarakat.

##### b. Tujuan

Setiap kebijakan tentu memiliki tujuan yang ingin di capai, terlebih tujuan tersebut menjadikan acuan supaya suatu kebijakan dapat berhasil dan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan bahwa cukup baik karena sasaran tujuan dari Kebijakan Distribusi dan Penetapan Harga Gas 3 Kg Bersubsidi sudah diketahui oleh masyarakat walaupun masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak terlalu menanggapi tujuan dari kebijakan pemerintah.

#### 2. Sumber Daya

Aset (baik dalam bentuk dana maupun insentif lainnya yang dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan)

##### a. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Tanpa tenaga kerja yang kompeten dan memadai, proses implementasi kebijakan akan terhambat atau bahkan tertunda.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan bahwa cukup baik karena sumber daya manusia (petugas) dalam melakukan kebijakan Distribusi dan Penetapan Harga Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi tersebut sudah memadai atau sudah mencukupi.

##### b. Sumber Daya Finansial

Selain sumber daya manusia yang menjadi hal penting dalam menentukan berhasil atau tidak sebuah kebijakan yaitu sumber daya finansial/dana, fasilitas sarana maupun prasarana penunjang yang merupakan pelengkap wajib dalam pelaksanaan suatu

kebijakan tanpa mencukupinya sumber daya maka akan berdampak negatif terhadap jalannya implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan cukup baik karena bahwa sumber daya finansial (dana/anggaran) dalam melakukan kebijakan pendistribusian tersebut ada tersedia dana untuk kegiatan pendistribusian Gas Lpg melakukan pengawasan tersebut.

### 3. Komunikasi

Keberhasilan pelaksanaan sering kali memerlukan adanya prosedur dan sistem kelembagaan yang memungkinkan pihak yang lebih tinggi untuk mengawasi agar proses implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditentukan. Hal ini juga berkaitan dengan komunikasi serta kualitas hubungan antar organisasi.

#### a. Dukungan Dari Instansi Lain

Dukungan dari instansi lain merupakan metode dalam salahsatu penguat aktivitas dari proses implementasi kebijakan. Semakin banyaknya dukungan dari instansi lain maka semakin mudah dan lancar proses implementasiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan cukup baik karena adanya dukungan dalam menjalankan kebijakan Distribusi dan Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Bersubsidi oleh pihak yang terkait.

#### b. Koordinasi Dengan Instansi Lain

Koordinasi merupakan suatu pola kerjasama dalam melakukan kegiatan tertentu dengan di kerjakan oleh banyak pihak dari suatu organisasi/instansi terkait untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari desa Sungai Buluh dan Desa Mantaas dapat di simpulkan kurang baik karena koordinasi tidak berjalan dengan baik antar pihak pengawas yangterkait di karenakan dari Dinas Perdagangan dan dari Kepala Desayang masih jarang bertemu sehingga informasi tidak tersampaikan secara langsung kepada masyarakat.

### 4. Struktur Birokrasi (Karakteristik Agen Pelaksana)

Fitur utama dari agen yang melaksanakan tugas mencakup kemampuan dan ukuran pelaksana, tingkat pengawasan hierarkis pada unit pelaksana yang paling bawah selama proses implementasi, dukungan politik dari pihak eksekutif dan legislatif, serta hubungan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.

#### a. Opini Publik

Kemajuan suatu kebijakan di tentukan pula oleh opini publik yaitu baik dari yang menjalankan ataupun menerima suatu kebijakan. Dengan adanya opini maka akan lebih memudahkan pemerintah/pelaksana maupun pihak yang terkait dalam mengkoreksi kegiatan ataupun proses dalam implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan kurang baik karena adanya tanggapan yang baik terhadap kebijakan tersebut oleh beberapa masyarakat tetapi kebijakan tersebut di jalankan masih kurang baik, karena adanya pangkalan yang memberikan jatah ke pengecer serta terdapat masyarakat yang tidak menanggapi kebijakan tersebut dan ada harga yang tidak sesuai dengan harga HET yang di karenakan ada upah untuk pengangkut sehingga harga yang di jual naik dari harga HET.

b. Dukungan Publik

Dukungan publik adalah dukungan yang di terima individu atau kelompok dari individu-individu tertentu dalam hidupnya dan berbeda di berbagai situasi sosial, yang membuat penerima merasa mendapat perhatian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan cukup baik karena adanya dukungan terhadap sebuah kebijakan Distribusi dan Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg Bersubsidi ini jika memberikan dampak yang bagus untuk masyarakat, sebaliknya jika kebijakan tersebut memberatkan masyarakat memungkinkan protes.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Aspek sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi. Apakah sumber daya ekonomi yang ada cukup memadai, sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat memengaruhi keadaan sosial dan ekonomi, bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, serta sejauh mana dukungan dari kalangan elit dalam pelaksanaannya.

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Hal ini di karenakan para pelaksana kebijakan harus mengerti dengan baik mengenai kondisi di wilayah tertentu agar mereka dapat dengan mudah mengimplementasikan.

Menurut informasi yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan pencatatan di desa Sungai Buluh dan Mantaas bisa di simpulkan kurang baik karena pengaruh kondisi sosial masyarakat terhadap kebijakan Distribusi dan Penetapan Harga Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi ini masih kurang baik, di karenakan masyarakat masih melihat dari segi harga yang mana harga bersubsidi lebih murah dari yang tidak bersubsidi sehingga masyarakat yang mampu membeli yang bersubsidi.

b. Kondisi Ekonomi

Keberhasilan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang memainkan peran krusial dalam pencapaiannya suatu kebijakan yang di jalankan. Ketika keuangan lancar maka banyak kegiatan yang terlaksana dengan baik sedangkan ketika keuangan tidak mencukupi maka akan terasa sulit.

Menurut temuan dari wawancara, pengamatan, dan pencatatan yang dilakukan di desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan kurang baik karena kondisiekonomi masyarakat yang kurang mampu bisa berpengaruh terhadap kebijakan tersebut karena adanya harga yang tidak sesuai dengan mestinya, sehingga mengganggu jalannya implementasi peraturan tersebut.

c. Kondisi Politik

Kondisi politik atau dukungan politik sangat diperlukan, hal ini agar kelancaran segala kegiatan di laksanakan di jalankan dengan baik yaitu tanpa ada hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan cukup baik karena kondisi politik di masyarakat masih aman saja selagi tidak ada ikut campur tangan pihak lain misal dari dina perdangangan lain terhadap kebijakan Distribusi dan Penetapan Harga Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi, karena kebijakan yang di buat pemerintah ini untuk kenyamanan masyarakat.

## 6. Disposisi Pelaksana

Tanggapan atau reaksi dari pihak yang melaksanakan mencakup pemahaman dan wawasan terhadap isi serta tujuan kebijakan, sikap terhadap kebijakan tersebut, dan sejauh mana sikap tersebut diungkapkan atau dipraktikkan.

### a. Pemahaman Pelaksana

Dalam proses pelaksanaan kebijakan tentu sangat memerlukan dukungan pemahaman dari semua implementor terhadap kebijakan yang akan mereka jalankan, tanpa pemahaman yang baik maka akan menjadi hambatan yang sangat serius bagi proses implementasi kebijakan yang artinya dapat menghambat segala kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan cukup baik karena adanya pemahaman yang baik terhadap kebijakan Distribusi dan Penetapan Harga Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi ini oleh masyarakat.

### b. Sikap Atas Kebijakan

Sikap adalah bagaimana tindakan individu atau kelompok dalam bersikap atau bertingkah laku dalam berinteraksi agar bisa mencapai tujuan bersama di dalam suatu kelompok atau organisasi.

Berdasarkan hasil wawancaradan observasi di desa Sungai Buluh dan Mantaas dapat di simpulkan kurang baik karena proses implementasi bisa di sebabkan oleh sikap dari kelompok terhadap keputusan-keputusan atau tindakan yang di buat oleh pelaksana implementasi.

## **A. “Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Distribusi Dan Penetapan Harga Lpg Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pada Desa Sungai Buluh dan Desa Mantaas)”**

Dalam suatu program yang dibentuk dan dijalankan pasti ada faktor yang mempengaruhi Untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, terdapat beberapa elemen yang dapat mendukung maupun menghalangi proses tersebut.

Adapun beberapa elemen yang dapat memengaruhi “Implementasi Kebijakan Distribusi Dan Penetapan Harga Lpg Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pada Desa Sungai Buluh dan Desa Mantaas)”

### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Implementasi mengacu pada elemen-elemen yang mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan suatu kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### a. Adanya Koordinasi Antar Badan Pelaksana

Berdasarkan pengamatan dan hasil percakapan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut tergolong positif, dikarenakan adanya faktor-faktor yang mendukung seperti mendukung Implementasi Kebijakan Distribusi dan Penetapan Harga Lpg Tabung Gas 3 Kg adalah Adanya Koordinasi Antar Badan Pelaksanterhadap peraturan yang ditetapkan sudah dimengerti walaupun ada sebagian masyarakat tidakmenjalankan peraturan kebijakan tersebut.

### 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam Implementasi mengacu pada elemen-elemen yang menghalangi atau menghambat keberhasilan suatu Kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh negatif dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut tidak memadai karena faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Distribusi dan Penertapan Harga Lpg Tabung Gas 3 Kg adalah kurangnya kesadaran masyarakat sehingga kebijakan ini mengalami hambatan karna tujuan dari kebijakan ini tidak terarah dengan baik.

b. Kurangnya Sosialisasi

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut tidak optimal disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Distribusi dan Penertapan Harga Lpg Tabung Gas 3 Kg adalah kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan Kebijakan tersebut tidak berjalan dengan lancar.

## SIMPULAN

“Implementasi Kebijakan dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pada Desa Sungai Buluh dan Desa Mantaas)” cukup baik, yaitu: Pertama, sub variabel standar dan tujuan di ketahui indikator kejelasan cukup baik. Pihak implementator sudah merasa jelas dan mengerti tentang kebijakan Implementasi Kebijakan serta Penentuan Tarif LPG Tabung Gas 3 Kg yang disubsidi di wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Indikator untuk tujuan tersebut sudah tercapai dengan baik, dan masyarakat di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah memahami kebijakan serta penerapan harga LPG Tabung Gas 3 Kg yang disubsidi tersebut, tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak terlalu menanggapi terhadap kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut tidak terarah. Kedua, sub variabel sumber daya di ketahui indikator sumber daya manusia (petugas) cukupbaik. Pihak pengawas yang terkait sudah memadai atau mencukupi saja. Indikator sumber daya finansial (dana) cukupbaik, sumber daya finansial sudah terpenuhi dengan baik untuk kegiatan operasional. Ketiga, sub variabel komunikasi diketahui (hubungan antar organisasi) diketahui indikator dukungan instansi cukup baik. Karena adanya dukungan antar pihak terkait dalam menjalankan kebijakanImplementasi Kebijakan dan Penentuan Tarif LPG Tabung Gas 3 Kg yang Disubsidi di Wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Indikator koordinasi kurang baik, dikarenakan masyarakat jarang bertemu sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik. Keempat, sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator opini publik kurang baik. Karena masyarakat mengatakan adanya pangkalan yang memberikan jatah ke pengecer dan masih terdapat masyarakat yang tidak menanggapi terhadap kebijakan dan terdapat ketidaksesuaian harga yang mana ini mengganggu jalannya implementasi. Indikator dukungan publik cukup baik, dikarenakan adanya dukungan dari masyarakat terhadapImplementasi Kebijakan dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kelima, sub variabel kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik diketahui kondisi sosial belum baik. Dikarenakan kondisi sosial masyarakat yang masih melihat dari segi harga jual yang mana harga bersubsidi lebih murah dari pada harga yang tidak bersubsidi. Indikator kondisi ekonomi kurang baik, dikarenakan adanya harga yang berbeda antara harga jual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintahsehingga ini berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Indikator kondisi politik cukupbaik, dikarenakan tidak ada ikut campur tangan pemerintah lain dalam dunia politik terhadapImplementasi Kebijakan dan Penetapan Harga LPG

Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keenam, sub variabel disposisi pelaksana diketahui indikator pemahaman masyarakat cukup baik, dikarenakan masyarakat sudah paham dan penetapan tarif LPG tabung gas 3 kg bersubsidi di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menunjukkan respon yang kurang positif. Hal ini disebabkan oleh adanya kelompok yang kurang peduli terhadap kebijakan tersebut, meskipun kebijakan dan harga LPG bersubsidi ini telah ditetapkan di wilayah tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Peraturan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga.
- Peraturan Menteri Edsm Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Harga Patokan Lequefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
- Abidin, Said Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salembahumanika
- Agustino. Leo (2020). *Dasar Dasar Kebijakan Publik* cetakan X Bandung: Alfabeta.
- Agustino. (2012). *Dasar Dasar Kebijakan Publik* cetakan X Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2021). *Kecamatan Labuan Amas Utara Angka Subdistrict In Figures*. Penerbit: Bps Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Gunawan, Imam.(2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Politik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Kartiwa, Asep. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung:Cv Pustaka Setia.
- Leo, Agustino. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Viii. Bandung: Alfabeta
- Sahya Anggara . (2014)*Donald S. Van Meter Carl E Van Horn Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori* PUSTAKA BELAJARSubarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik* . Cetakan X. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR
- Subarsono, Ag. 2022. *Analisis Kebijakan Publik* Cetakan ke -11 Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tahir, Arifin.(2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung:Alfabeta.
- Tim Penyusun. (2022). *Buku Pedoman Penyusun Dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik*. Penerbit: Stia Amuntai.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta: Bumi Askara.
- Daud, (2017) Universitas Riau dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas 3 Kg di Kabupaten Minasa Selatan



Zahra, 2019. Pengawasan Penyaluran LPG 3 Kg di Kecamatan Amuntai Tengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Skripsi Sarjana pada STIA Amuntai.